

PENCEGAHAN - PENANGGULANGAN - HIV-AIDS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS

- ABSTRAK : - Bahwa Provinsi Sulawesi Utara merupakan Daerah dengan tingkat epidemic HIV - AIDS yang cukup tinggi di Indonesia sehingga perlu upaya pencegahan dan penanggulangannya.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp. Tahun 1960 Jo UU No. 13 Tahun 1964, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 9 Tahun 1990, UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1997.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
 1. KETENTUAN UMUM;
 2. OBJEK dan SUBJEK;
 3. RUANG LINGKUP;
 4. KELEMBAGAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS;
 5. PERAN SERTA MASYARAKAT;
 6. PEMBIAYAAN;
 7. SANKSI ADMINISTRASI;
 8. KETENTUAN PIDANA;
 9. PENYIDIKAN;
 10. KETENTUAN LAIN-LAIN;
 11. KETENTUAN PENUTUP.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2009
- Diundangkan pada tanggal 17 Juli 2009

PENCABUTAN - PERDA - RETRIBUSI DAERAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2

2009

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA BUAH PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI BIDANG RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah di bidang retribusi daerah, dipandang perlu mencabut beberapa buah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- Dasar hukum: UU No. 47 Prp. Tahun 1960 Jo UU No. 13 Tahun 1964, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 66 Tahun 2001, UU No. 79 Tahun 2005, Permendagri No. 15 Tahun 2006.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
1. Pasal 1;
2. Pasal 2.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2009
- Diundangkan pada tanggal 17 Juli 2009

PERUBAHAN - PERDA - RETRIBUSI

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3

2009

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

ABSTRAK : - Bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 3 tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 1 tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan.

- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2001; Perpu No. 38 Tahun 2007; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2003.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
1. Pasal I;
2. Pasal II.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2009
- Diundangkan pada tanggal 17 Juli 2009

PENYESUAIAN - TARIF ANGKOT - MOBIL BUS UMUM
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 1
2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN
PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS
UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa Berdasarkan Permen ESDM No 1 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum serta sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan, perlu menyesuaikan kembali tarif angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum di Provinsi Sulawesi Utara yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 44 Tahun 2008.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 33 Tahun 1964; UU No. 34 Tahun 1964; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 1993; Permendagri No. 15 Tahun 2007; Kepmenhub No. KM. 89 Tahun 2002; Kepmenhub No. KM 35 Tahun 2003; Permen ESDM No. 1 Tahun 2009.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4;
 5. Pasal 5;
 6. Pasal 6;
 7. Pasal 7;
 8. Pasal 8;
 9. Pasal 9;
 10. Pasal 10.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2009

PENYESUAIAN - TARIF -ANGKUTAN LAUT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 2

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN KEMBALI TARIF DASAR PENUMPANG ANGKUTAN LAUT DENGAN KAPAL LOKAL YANG BEROPERASI DALAM WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan kebijakan Pemerintah tanggal 12 Januari 2009 tentang Penetapan harga Bahan Bakar Minyak dan dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan laut serta guna menjamin kelancaran dan ketertiban lalu lintas dengan kapal - kapal penumpang lokal yang beroperasi dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang diatur dalam Pergub Sulawesi Utara No 16 Tahun 2008 untuk disesuaikan.

- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 33 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 3 Tahun 1983; PP No. 82 Tahun 1999; Permen ESDM No. 1 Tahun 2009; SK.Menhub No. KM.103 Tahun 1990; Kepmenhub No. KM.4 Tahun 2003; Permenhub No. KM.57 Tahun 2006; Permenhub No. KM.22 Tahun 2007.

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:

1. Pasal 1;
2. Pasal 2;
3. Pasal 3;
4. Pasal 4;
5. Pasal 5;
6. Pasal 6;
7. Pasal 7;
8. Pasal 8;
9. Pasal 9.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2009

PENYESUAIAN - TARIF ANGKUTAN - ANTAR KABUPATEN/KOTA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 3
2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Permen ESDM No. 1 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009, maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan angkutan penyeberangan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi untuk lintas antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan memperhatikan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan penyeberangan.

- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004; Perpres No. 16 Tahun 2008; PP No. 82 Tahun 1999; PP No. 69 Tahun 2001; Kepmenhub No. 32 Tahun 2001; Kepmenhub No. 58 Tahun 2003; Permendagri No. 15 Tahun 2007; Permenkeu No. 37/PMK.010/2008.

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:

1. Pasal 1;
2. Pasal 2;
3. Pasal 3;
4. Pasal 4;
5. Pasal 5;
6. Pasal 6;
7. Pasal 7;
8. Pasal 8;
9. Pasal 9;
10. Pasal 10.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2009

TATA KERJA - STAF AHLI

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 4

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KERJA PARA STAF AHLI GUBERNUR
SULAWESI UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi para Staf Ahli Gubernur, maka perlu mengatur Tata Kerja para Staf Ahli Gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 39 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 2 Tahun 2008; Pergub Sulawesi Utara No 45 Tahun 2008.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Kedudukan;
 2. Tata Kerja;
 3. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2009

ALOKASI SEMENTARA - BAGI HASIL

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 4a

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR (PKAA), BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR (BBN-KAA), PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH (P3ABT) DAN AIR PERMUKAAN (P3AP) TAHUN ANGGARAN 2009

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 6 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 8 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan diatas Air, Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, maka dipandang perlu menetapkan Pergub Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tahun Anggaran 2009.

- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 1997; UU No 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Sulawesi Utara No. 20 Tahun 2006; Perda Sulawesi Utara No. 21 Tahun 2006; Perda Sulawesi Utara No. 22 Tahun 2006; Perda Sulawesi Utara No. 6 Tahun 2002;

Perda Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2002; Perda Sulawesi Utara No. 8 Tahun 2002; Perda Sulawesi Utara No. 9 Tahun 2008; Pergub Sulawesi Utara No. 24 Tahun 2008;

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4;
 5. Pasal 5;
 6. Pasal 6;
 7. Pasal 7.

- CATATAN
- : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2009

KOORDINASI - HUBUNGAN KERJA - SATUAN KERJA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 5

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, perlu mengatur koordinasi dan hubungan kerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri 57 Tahun 2007; Perda Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2005; Perda Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2008; Perda Sulawesi Utara No. 2 Tahun 2008; Perda Sulawesi Utara No 3 Tahun 2008; Perda Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2008; Pergub No. 15 Tahun 2005.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. KETENTUAN UMUM;
 2. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DAERAH;
 3. PEMBIDANGAN KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA;
 4. ALUR KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA;
 5. KETENTUAN PENUTUP.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2009

SEKRETARIAT - DEWAN PENGURUS - KORPRI

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 6

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS PROVINSI KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SULAWESI UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia Sulawesi Utara, maka dipandang perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Sulawesi Utara.

- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 42 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Kepres No. 82 Tahun 1971; Kepres No. 16 Tahun 2005; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 47 Tahun 2008; Perda Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2005.

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:

1. KETENTUAN UMUM;
2. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;
3. SUSUNAN ORGANISASI;
4. URAIAN TUGAS;
5. TATA KERJA;
6. ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN;
7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;
8. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2009

STRUKTURAL - ESELON IV - KOORDINASI PENYULUHAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 7

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STRUKTURAL
ESELON IV PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pemberian dukungan terhadap pelaksanaan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, maka dipandang perlu membentuk jabatan struktural eselon IV pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2005; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2008.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. KETENTUAN UMUM;
 2. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS;
 3. PENUTUP.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2009

STANDARISASI - HARGA - BARANG DAN JASA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 8

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2009

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengendalian, keseragaman harga dan menghindari pemborosan pelaksanaan pengadaan barang, dipandang perlu menetapkan Standarisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2009.

- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Permendagri No. 7 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 31 Tahun 2003; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 9 Tahun 2004.
- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4;
 5. Pasal 5.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2009

PERGESERAN - ANGGARAN BELANJA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 8a

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERGESERAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2009

- ABSTRAK : - Bahwa guna menunjang kebutuhan dana untuk kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, maka dipandang perlu melakukan pergeseran anggaran dengan menambah dan mengurangi Anggaran pada Belanja Langsung.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 56 Tahun 2005; UU No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 9 Tahun 2008.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2009

PERJALANAN DINAS - PEJABAT NEGARA - PNS - PTT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 9
2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No 24 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perrmendagri No. 59 Tahun 2007.
- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4;
 5. Pasal 5;
 6. Pasal 6;
 7. Pasal 7;
 8. Pasal 8;
 9. Pasal 9;
 10. Pasal 10;
 11. Pasal 11;
 12. Pasal 12;
 13. Pasal 13;
 14. Pasal 14;
 15. Pasal 15;
 16. Pasal 16;
 17. Pasal 17;
 18. Pasal 18;
 19. Pasal 19.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2009

LEMBAGA - PENGEMBANGAN - TILAWATIL QUR'AN - 2009-2014

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 10

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE 2009-2014

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat khususnya yang bergama Islam di Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu membentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sulawesi Utara.

- Dasar hukum UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 32 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 1986; PP No. 6 Tahun 1988; Keputusan Bersama Menag dan Mendagri No. 182A Tahun 1988 dan No. 4 Tahun 1988; Kepmenag No. 240 Tahun 1989; Permendagri No. 15 Tahun 2006.

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1. NAMA, AZAS DAN KEDUDUKAN;
2. ORGANISASI;
3. TUGAS;
4. TATA KERJA;
5. PEMBIAYAAN;
6. PENUTUP.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2009

PEMBATASAN - PENGOPERASIAN - KENDARAAN BERMOTOR

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 11

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBATASAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MANADO SELAMA BERLANGSUNGNYA PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (WORLD OCEAN CONFERENCE) DAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI INISIATIF SEGITIGA TERUMBU KARANG (CORAL TRIANGLE INITIATIVE SUMMIT) TAHUN 2009 DI MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) dan Konferensi Tingkat Tinggi Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Initiative Summit) Tahun 2009 di Manado Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Mei 2009, diperkirakan akan terjadi peningkatan arus lalu lintas kendaraan bermotor khususnya di Kota Manado;
- Bahwa untuk terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama berlangsungnya kegiatan konferensi tersebut, perlu dilakukan pembatasan pengoperasian kendaraan bermotor di kota Manado.
 - Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Provinsi Sulawesi Utara No.2 Tahun 2007; Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 38 Tahun 2009.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4;
 5. Pasal 5;
 6. Pasal 6;
 7. Pasal 7.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 11 April 2009
- Diundangkan pada tanggal
(Tidak terdapat tanggal diundangkan)

PERUBAHAN LAMPIRAN - ALOKASI - PUPUK BERSUBSIDI
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 12
2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 38a TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2009

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 38a Tahun 2008 telah ditetapkan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2009.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 77 Tahun 2005; Permentan No. 02/Pert/HK.060/2/2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permentan No. 08/Permentan/SR.140/2 /2007; Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008; Permentan No. 42/Permentan/09/2008; Permentan No. 05/Permentan/OT.140/1/2009; Kepmentan No. 08/P/TP.260/1/2003; Kepmentan No. 237/Kpts/OT.210/4/2003; Kepmentan No. 239/Kpts/OT.210/4/2003.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 15 April 2009
- Diundangkan pada tanggal 15 April 2010

PEMBERIAN - BANTUAN SOSIAL

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 13

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN SERTA
LEMBAGA/ORGANISASI PROFESI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, serta partisipasi dalam pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat, perlu menyediakan bantuan dana kepada lembaga/ organisasi sosial dan masyarakat serta lembaga/ organisasi profesi.

- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 59 Tahun 2007.

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1. Pasal 1;
2. Pasal 2;
3. Pasal 3;
4. Pasal 4;
5. Pasal 5;
6. Pasal 6;
7. Pasal 7;
8. Pasal 8;
9. Pasal 9.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 15 April 2009
- Diundangkan pada tanggal 15 April 2010

PERUBAHAN PERTAMA - PEMBENTUKAN - UNIT PELAKSANA - DINAS PU
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 14
2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 88 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Utara serta mendukung penyelenggaraan WOC, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 88 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara perlu dilakukan perubahan.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendari No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2005; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2008.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. BAB IV: URAIAN TUGAS.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2009

BADAN PENGELOLA - KAWASAN PERBATASAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 15

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA
KAWASAN PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, maka dipandang perlu membentuk Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2005; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2008.

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:

1. KETENTUAN UMUM;
2. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;
3. SUSUNAN ORGANISASI;
4. URAIAN TUGAS;
5. TATA KERJA;
6. ESELONERING;
7. KEPEGAWAIAN;
8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;
9. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2009

PAJAK - BEA BALIK NAMA - KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 16
2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN BESARNYA PEMBERIAN
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor, perlu memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. 4 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pasal 21 Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. 5 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kepala Daerah dapat memberikan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 15 Tahun 2006; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 4 Tahun 1998; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 5 Tahun 1998.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4;
 5. Pasal 5;
 6. Pasal 6;
 7. Pasal 7.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2009

RKPD - PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 16a

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, serta implementasi dari Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2005 tentang RPJMD Tahun 2005-2010 Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu menetapkan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010.

- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 2004; Perda No 4 Tahun 2005.

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:

1. Pasal 1;
2. Pasal 2;
3. Pasal 3;
4. Pasal 4;
5. Pasal 5;
6. Pasal 6.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2009
- Diundangkan pada tanggal
(Tidak terdapat tanggal diundangkan)

STANDARISASI - HONORARIUM/UPAH - TUGAS/KEGIATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 17

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI HONORARIUM/UPAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS/KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya peningkatan kinerja serta tertib administrasi penggunaan dana di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, maka dipandang perlu menetapkan kembali standarisasi honorarium/upah dalam pelaksanaan tugas/kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1979; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Perda Provinsi Sulawesi Utara No 4 Tahun 2005; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 4 tahun 2006; Perda No 1 Tahun 2008; Perda No. 2 Tahun 2008; Perda No. 3 Tahun 2008; Perda No. 4 Tahun 2008.

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:

1. Pasal 1;
2. Pasal 2;
3. Pasal 3;
4. Pasal 4;
5. Pasal 5;
6. Pasal 6;
7. Pasal 7;
8. Pasal 8;
9. Pasal 9.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2009
- Diundangkan pada tanggal
- (Tidak terdapat tanggal diundangkan)

TARIF - ANGKUTAN PENUMPANG - TRANS KAWANUA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 18
2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BUS
TRANS KAWANUA DI KOTA MANADO DAN SEKITARNYA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan penumpang umum di wilayah perkotaan Manado dan sekitarnya telah ditetapkan pengoperasian bus umum Trans Kawanua yang melayani trayek meliputi wilayah Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa;
- Bahwa untuk kelangsungan pelayanan tersebut diatas ditetapkan tarif sebagai pedoman pelayanan jasa angkutan penumpang umum dimaksud.
 - Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 33 Tahun 1964; UU No. 34 Tahun 1964; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 1993; Permendagri No. 15 Tahun 2007; Kepmenhub No. KM.89 Tahun 2002; Kepmenhub No. KM.35 Tahun 2003.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4;
 5. Pasal 5;
 6. Pasal 6;
 7. Pasal 7.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2009

MEMBERLAKUKAN - PAJAK - BEA BALIK NAMA - KENDARAAN DI ATAS AIR
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 19
2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS
MUTANDIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2009

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2002 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dan Perda No. 5 Tahun 2002 Tentang Kendaraan di Atas Air;
- Bahwa dengan Permendagri No. 28 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 telah ditetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air tahun 2009.
 - Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 51 Tahun 2002; Permendagri No 28 Tahun 2009; Perda No 4 Tahun 2002; Perda No 5 Tahun 2002; Pergub No.62 Tahun 2008.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4;
 5. Pasal 5;
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2009

MEMBERLAKUKAN - PAJAK - BEA BALIK NAMA - KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 20
2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2009

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Perda No. 5 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Permendagri No. 29 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009, pemberlakuan Dasar Kendaraan Bermotor ditetapkan lebih lanjut dengan Pergub.
 - Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; Permendagri No. 024-1014 Tahun 1986; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 29 Tahun 2009; Perda No. 4 Tahun 1998; Perda No. 5 tahun 1998; Pergub No. 62 Tahun 2008.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4;
 5. Pasal 5;
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2009

PEMBATASAN - KENDARAAN BERMOTOR - SELAMA SAIL BUNAKEN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 21

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBATASAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MANADO DAN KOTA BITUNG SELAMA BERLANGSUNGNYA PELAKSANAAN SAIL BUNAKEN TAHUN 2009 DI KOTA MANADO DAN KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sail Bunaken Tahun 2009 di Kota Manado dan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Agustus 2009, diperkirakan akan terjadi peningkatan arus lalu lintas kendaraan bermotor khususnya di kota Manado dan kota Bitung;
- Bahwa untuk terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama berlangsungnya kegiatan Sail Bunaken tersebut, perlu dilakukan pembatasan pengoperasian kendaraan bermotor di kota Manado dan Kota Bitung.
 - Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres No. 2 Tahun 2009; Kepgub No 139 Tahun 2009.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4;
 5. Pasal 5;
 6. Pasal 6;
 7. Pasal 7;
 8. Pasal 8.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2009
- Diundangkan pada tanggal
(Tidak terdapat tanggal diundangkan)

PENJABARAN - PERTANGGUNGJAWABAN - APBD - 2008

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 22

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2008

- ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ANggaran 2008 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2008.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo No. 13 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 8 Tahun 2006; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2007; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2009; Pergub Sulawesi Utara No. 48 Tahun 2007; Pergub Sulawesi Utara No. 259 Tahun 2008.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4;
 5. Pasal 5;

6. Pasal 6.

- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal
(tidak terdapat tanggal penetapan)

PENJABARAN - PERUBAHAN - APBD - 2009

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 23

2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2009

- ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo No. 13 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 59 Tahun 2007; Pergub No. 24 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 5 Tahun 2005.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4;
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2009

PEMBENTUKAN - BADAN PROMOSI - PARIWISATA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 24
2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI
PARIWISATA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan di Daerah, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, perlu membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2004; Permendagri No. 15 Tahun 2006.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. KETENTUAN UMUM;
 2. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;
 3. SUSUNAN ORGANISASI
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2009

PEMBENTUKAN - PELAKSANA TEKNIS - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 25
2009

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (5) Perda Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Sulawesi Utara Lain Provinsi Sulawesi Utara, maka dipandang perlu menetapkan Pergub Sulawesi Utara tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 4 Tahun 2005; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 4 Tahun 2008; Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2008.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. KETENTUAN UMUM;
 2. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS;
 3. SUSUNAN ORGANISASI
 4. URAIAN TUGAS;
 5. TATA KERJA;
 6. ESELONERING;
 7. KEPEGAWAIAN;
 8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;
 9. KETENTUAN PENUTUP
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2009